



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN TIMUR

Jl. H. Abdullah No. 20, Nyamuk, Siantan Timur, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Pos-el kecamatansiantantimur@gmail.com

Nyamuk, 15 September 2025

Kepada

Yth: Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : B/400.6.1/255/CMT-KST/09.2025

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bersama ini di sampaikan : Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Siantan Timur Tahun2025- 2030	1 (satu) berkas	Demikian kami sampaikan untuk dapat diketahui, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih

Pt. CAMAT SIANTAN TIMUR,



ARPANDI, S.Sos.I

Penata Tk I / III.d

NIP. 19810310 201001 1 024



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN SIANTAN TIMUR**
Tahun
2025 - 2029



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Timur periode 2025–2030 dapat disusun dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Siantan Timur dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas, serta pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Renstra ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sekaligus memperhatikan potensi lokal dan aspirasi masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui masukan, ide, maupun data yang relevan. Harapan kami, Renstra ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mengoptimalkan potensi Kecamatan Siantan Timur sekaligus menghadapi tantangan yang ada selama lima tahun mendatang. Semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi langkah awal dalam mewujudkan visi dan misi Kecamatan Siantan Timur.

Tarempa, Januari 2025

CAMAT SIANTAN TIMUR,



SUHADI KUSUMOWIJOYO, S.Pd

Penata Tk I / III.d

NIP. 19780117 200312 1 007



DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	i
<u>DAFTAR ISI</u>	ii
<u>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</u>	iv
<u>BAB I</u>	
<u>PENDAHULUAN</u>	1
1.1 <u>Latar Belakang</u>	1
1.2 <u>Dasar Hukum Penyusunan</u>	3
1.3 <u>Maksud dan Tujuan</u>	6
1.4 <u>Sistematika Penulisan</u>	7
<u>BAB II</u>	
<u>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</u>	
<u>PERANGKAT DAERAH</u>	8
2.1 <u>Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</u>	8
2.1.1. <u>Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah</u>	8
2.1.2 <u>Sumber Daya Perangkat Daerah</u>	11
2.1.3 <u>Kinerja Pelayanan</u> Perangkat Daerah.....	16
2.1.4 <u>Kelompok sasaran layanan</u>	21
2.2 <u>Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah</u>	21
2.2.1 <u>Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah</u>	21
2.2.2 <u>Isu Strategis</u>	25
<u>BAB III</u>	
<u>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</u>	29
3.1 <u>Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030</u>	29
3.2 <u>Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030</u>	32
3.3 <u>Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030</u>	33
3.4 <u>Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2030</u>	34
<u>BAB IV</u>	
<u>PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA</u>	
<u>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</u>	36
4.1 <u>Uraian Program</u>	36
4.2 <u>Uraian Kegiatan</u>	37
4.3 <u>Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, terget dan pagu</u>	

<u>indikatif</u>	38
<u>4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah</u>	53
<u>4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah</u>	
<u>4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)</u>	57
<u>BAB V</u>	
<u>PENUTUP</u>	58

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan.....	11
Tabel 2.1.2	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	132
Tabel 2.1. 3	
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin	133
Tabel 2.... 1.4	
Sarana dan Prasarana Pendukung.....	15
Tabel 2.1. 5	
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas	137
Tabel 2.1.6.	
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	19
Tabel 2.1.7.	
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	24
Tabel 2.2.1.	
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah	31
Tabel3.1.	
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	34
Tabel 3.4.	
Subkegiatan,Kinerja,Indikator,Target dan Pagu Indikatif Kecamatan Siantan Timur	39
Tabel 4.3.	
Indikator Kinerja Utama Tabel.4.5	
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran.....	55
Indikator Kinerja Perangkat Daerah	56
Tabel 4.6	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan tujuan pembangunan dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk itu, perencanaan yang terkonsep dan tersusun dengan baik tentunya sangat berpengaruh demi mencapai hasil yang optimal di masa mendatang.

Penyusunan dokumen ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan, yang mencakup perumusan kebijakan, pelayanan publik, serta koordinasi pembangunan. Sebagai salah satu elemen pemerintah daerah, Kecamatan Siantan Timur menyusun dokumen Renstra ini selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2030 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta selaras dengan rencana strategis Provinsi. Dengan demikian, Rancangan Akhir Renstra ini berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjembatani visi pembangunan daerah dengan pelaksanaan program kerja di tingkat kecamatan.

Seiring dengan dinamika pembangunan daerah, Kecamatan Siantan Timur juga menghadapi perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional. Perkembangan teknologi, tuntutan pelayanan publik yang lebih baik, dan kebutuhan akan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi faktor penting yang harus

diperhatikan. Oleh karena itu, perencanaan strategis ini dirancang untuk menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai tindak lanjut dari mandat perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Renstra Kecamatan Siantan Timur periode 2025–2029 menjadi dokumen penting yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas kecamatan untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.

Dalam penyusunannya, Renstra ini mengedepankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Proses penyusunan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, pemangku kepentingan, hingga masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Potensi lokal Kecamatan Siantan Timur, seperti sektor perikanan, pariwisata, dan kearifan lokal, menjadi keunggulan yang harus dioptimalkan. Namun, potensi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, minimnya akses terhadap pasar, dan risiko perubahan iklim. Renstra ini diharapkan mampu menjadi dokumen strategis yang tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga memberikan solusi yang konkret dan berkelanjutan untuk pembangunan kecamatan.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Siantan Timur dapat bekerja sama secara sinergis dalam mewujudkan visi

pembangunan yang telah ditetapkan. Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi upaya bersama dalam menghadirkan perubahan positif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas secara keseluruhan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Siantan Timur adalah sebagai berikut :

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1- 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 105 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 105);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Siantan Timur periode 2025–2029 memiliki maksud utama sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini dirancang untuk memberikan arah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi wilayah secara efektif dan efisien.

b. Tujuan

Tujuan utama penyusunan Renstra ini adalah untuk menyelaraskan visi dan misi Kecamatan Siantan Timur dengan kebijakan pembangunan di tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini bertujuan agar setiap program kerja kecamatan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, Renstra ini juga bertujuan untuk memastikan perencanaan yang terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Secara khusus, penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan dokumen panduan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas Kecamatan Siantan Timur selama lima tahun ke depan.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan potensi wilayah yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan langkah- langkah strategis pembangunan.

3. Meningkatkan sinergi antara pemerintah kecamatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan.
4. Membangun sistem perencanaan yang akuntabel dan transparan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Mendorong implementasi program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025- 2030 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, Dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penulisan Renstra.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Siantan Timur, Sumber daya Kecamatan Siantan Timur, Kinerja pelayanan Kecamatan Siantan Timur yang memuat capaian-capaian SPM sesuai dengan tupoksi, menjelaskan Kelompok sasaran layanan di Kecamatan Siantan Timur, Permasalahan pelayanan Kecamatan Siantan Timur dan Isu Strategis berisi tentang identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Kecamatan Siantan Timur, telaah dan rumusan isu – isu strategis..

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Siantan Timur Tahun 2025-2030 dan

strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan Program kegiatan, Subkegiatan Dan Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Siantan Timur yang memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja indikator, target, pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Siantan Timur Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (IKK) yang menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap isi perencanaan dan pelaksanaan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Siantan Timur.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Siantan Timur memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kecamatan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pemerintahan umum di wilayahnya. Tugas ini mencakup koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan program prioritas daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Siantan Timur menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan desa serta menyelaraskan program kerja dengan kebijakan daerah.

2. Pelayanan Publik

Menyelenggarakan layanan administratif kepada masyarakat, termasuk penerbitan dokumen kependudukan, perizinan tertentu, dan pelayanan lainnya.

3. Pelaksanaan Pembangunan

Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.

4. Pengelolaan Keuangan dan Aset

Mengelola anggaran kecamatan serta aset yang dimiliki dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari :

1. Camat

Pimpinan kecamatan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Membantu camat dalam koordinasi administrasi, yang terdiri dari:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Program dan Perencanaan



3. Seksi-seksi Teknis

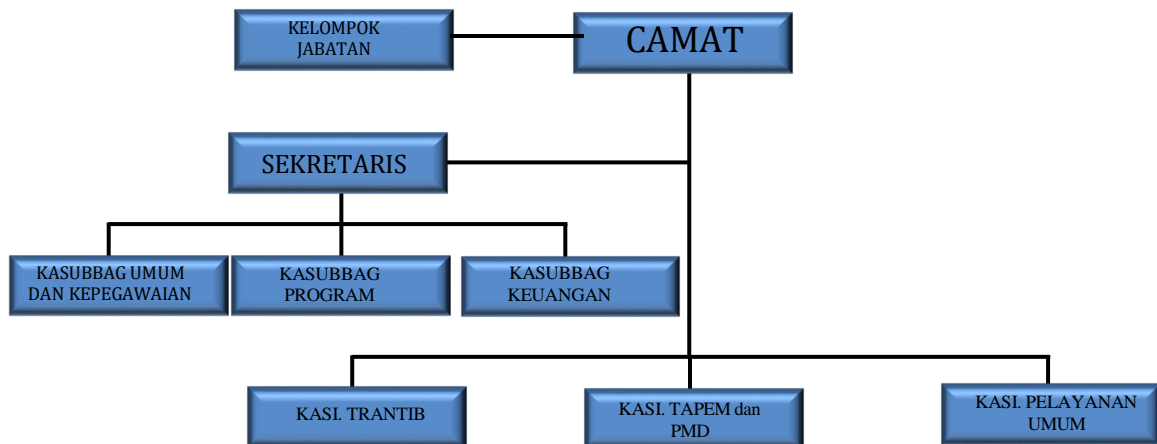
Melaksanakan tugas-tugas teknis kecamatan, yang meliputi:

- Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Pelayanan Umum

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Mendukung pelaksanaan tugas tertentu berdasarkan keahlian dan kompetensi masing-masing. Lebih lanjut Struktur Organisasi Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 2.1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Siantan Timur
Kabupaten Kepulauan Anambas



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Aparatur Kecamatan Siantan Timur Per Januari 2025 berjumlah 70 (tujuh puluh) orang terdiri dari 19 Pegawai Negeri Sipil dan 51 Pegawai Tidak Tetap. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi Pegawai Kecamatan Siantan Timur Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina	Eselon III.a	0 Orang
Penata Tk. I	Eselon III.a	0 Orang
Penata Tk. I	Eselon IV.a	2 Orang

Penata	Eselon IV.a	2 Orang
Penata Muda Tingkat I	Eselon IV.a	0 Orang
Penata Muda	Eselon IV.b	0 Orang
Penata Muda	Staf	0 Orang
Pengatur Tingkat I	Staf	2 Orang
Pelaksana	Staf	0 Orang
PPPK	Staf	26 Orang
Jumlah		32 Orang

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai Kecamatan Siantan Timur Tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
	ASN : 6 Orang	S2 : 0 Orang
		S1 : 4 Orang
		D3 : 0 Orang
		SMA/SMK : 2 Orang
	Tenaga PPPK : 26 Orang	S1 : 7 Orang
		D3 : 0 Orang
		SMA/SMK : 15 Orang
		SD : 4 Orang
		NON PENDIDIKAN : 0 Orang
Jumlah		32 Orang

Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Kecamatan Siantan Timur didominasi kaum perempuan yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasar kelamin.

Tabel 2.1.4
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
ASN	6	0
ASN PPPK	14	12
Jumlah	20	12

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di Kecamatan Siantan Timur. Namun, saat ini terdapat tantangan yang signifikan terkait distribusi ASN yang belum merata di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ulang agar ASN dapat terdistribusi dengan baik

sesuai kebutuhan tugas, pokok, dan fungsi yang bersifat koordinatif. Penataan ini juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan ASN yang bertugas didominasi oleh lulusan minimal tingkat Sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat berjalan secara seimbang dan efisien, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Selain itu, dalam menghadapi kebutuhan sumber daya aparatur yang terus meningkat, perekrutan ASN menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam lima tahun mendatang. Jumlah ASN yang terbatas saat ini menuntut adanya kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang direncanakan pada tahun 2025. Perekrutan P3K ini diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak, terutama pada unit kerja yang membutuhkan tenaga ahli. Selain itu, aspek kesetaraan gender juga tetap menjadi perhatian, mengingat proporsi aparatur perempuan saat ini sudah cukup memadai. Dengan memastikan keterwakilan gender yang proporsional, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan Timur juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui

perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Kecamatan Siantan Timur diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 2.1.5
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	1 Unit	2016
2	Printer	2 Unit	2016
3	PC	6 Unit	2017
4	Laptop	9 Unit	2017
5	Printer	6 Unit	2017
6	Meja Rapat	1 Unit	2017
7	Meja Kerja Eselon II	1 Buah	2017
8	Meja Kerja Eselon III	5 Buah	2017
9	Meja Kerja Non Struktural	24 Buah	2017
10	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	14 Buah	2017
11	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1 Buah	2017
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	2017
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	2017
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10 Buah	2017
15	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	40 Buah	2017
16	Kursi Tamu	1 Set	2017
17	Lemari Arsip	2 Buah	2017
18	Proyektor	1 Buah	2017
19	Meja Kerja I.2 Biro	4 Unit	2018
20	Kursi Kerja Putar	12 Unit	2018
21	Lemari Arsip	4 Unit	2018
22	Lemari Buku	1 Unit	2018
23	Laptop	2 Unit	2018
24	Personal Computer (PC)	2 Unit	2018
25	Lemari Arsip	2 Unit	2019
26	Lemari Buku	2 Unit	2019
27	Laptop	4 Unit	2019
28	Personal Computer (PC)	4 Unit	2019
29	Printer	4 Unit	2019
30	Sepeda Motor (matic)	1 Unit	2020

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Siantan Timur terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan administratif seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, dan layanan informasi publik dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kecamatan Siantan Timur juga mengembangkan pendekatan yang berbasis teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, Kecamatan Siantan Timur aktif dalam membina dan mendampingi desa-desa di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti kegiatan jemput bola untuk pengurusan dokumen, telah menjadi salah satu langkah inovatif untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Dengan dukungan SDM yang kompeten dan sinergi antara perangkat kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat, Kecamatan Siantan Timur menunjukkan kinerja yang semakin baik dalam mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas dan inklusif.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu;

Tabel 2.1.6 (Tabel T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Siantan Timur
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Targe NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	B	-	CC (51,56)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)	B (69)	BB (71)	CC (51,56)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)	B (69)		CC (51,56)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)	B (69)	BB (71)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	B	-	B (81,29)	B (82)	B (83)	A (86)	A (86,5)	A (87)	B (81,29)	B (82)	B (83)	A (86)	A (86,5)		B (81,29)	B (82)	B (83)	A (86)	A (86,5)	A (87)
3	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	-	100%	-	80%	80%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	80%	80%	80%		80%	80%	80%	80%	80%	100%
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kinerja Kecamatan Siantan Timur terus menunjukkan perkembangan positif dalam berbagai aspek pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Berdasarkan data indikator kinerja, Indeks Reformasi Birokrasi meningkat secara konsisten dari kategori CC (51,56) pada tahun 2021 menjadi B (69) pada tahun 2025, dengan proyeksi mencapai BB (71) pada tahun 2026. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga mengalami peningkatan, dari kategori B (81,29) pada tahun 2021 menjadi A (87) pada tahun 2026, menunjukkan keberhasilan Kecamatan Siantan Timur dalam memberikan pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat.

Dalam mendukung pembangunan desa, Kecamatan Siantan Timur telah menargetkan peningkatan persentase desa berkembang menuju desa mandiri, yang dimulai pada tahun 2025 dengan capaian awal sebesar 20% dan direncanakan mencapai 100% pada tahun 2026. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan tetap menjadi prioritas utama, dengan target partisipasi mencapai 100% setiap tahun hingga tahun 2026. Data ini menggambarkan komitmen Kecamatan Siantan Timur untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi yang kuat dalam setiap program pembangunan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan wilayah secara menyeluruh.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Siantan Timur, yaitu:

Tabel 2.1.7 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Siantan Timur Kab. Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.986.56.78	2.998.048.463	2.109.212.768	2.998.048.46	2.998.048.463,00	2.998.048.463,00	2.986.456.78	2.998.048.463	2.109.212.768	2.998.048.46	2.998.048.463,00		2.986.456.78	2.998.048.463	2.109.212.768	2.998.048.46	2.998.048.463,00	2.998.048.463,00	2.998.048.463,00	2.998.048.463,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	327.346.063,00	327.346.063,00	327.346.063,00	327.346.063,00	327.346.063,00	327.346.063,00	327.346.063,00	327.346.063,00	327.346.063,00	327.346.063,00	327.346.063,00		327.346.063,00	327.346.063,00	327.346.063,00	327.346.063,00	327.346.063,00	327.346.063,00	327.346.063,00	327.346.063,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	188.985.681	190.647.000	190.647.000	190.647.000	190.647.000	190.647.000	188.985.681	190.647.000	190.647.000	190.647.000	190.647.000		188.985.681	190.647.000	190.647.000	190.647.000	190.647.000	190.647.000	190.647.000	190.647.000
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	94.492.840	50.109.928,00	50.109.928,00	50.109.928,00	50.109.928,00	50.109.928,00	94.492.840	50.109.928,00	50.109.928,00	50.109.928,00	50.109.928,00		94.492.840	50.109.928,00	50.109.928,00	50.109.928,00	50.109.928,00	50.109.928,00	50.109.928,00	50.109.928,00

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Siantan Timur yaitu Desa Se-Kecamatan Siantan Timur dan instansi yang berada di wilayah Kecamatan Siantan Timur serta Semua Warga Negara masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Siantan Timur. Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Siantan Timur juga menjalin koordinasi dengan Perangkat Daerah Lainnya.

2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Siantan Timur memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik, membina pemerintahan desa, dan mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Siantan Timur dihadapkan pada berbagai tantangan yang berkaitan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang ada seringkali menjadi hambatan dalam mencapai kinerja pelayanan yang optimal dan keberhasilan program pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi secara mendalam untuk memahami permasalahan yang muncul dan isu strategis yang perlu ditangani.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Siantan Timur tidak hanya mencakup aspek internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, tetapi juga aspek eksternal seperti dampak perubahan iklim, tingkat partisipasi masyarakat, serta persaingan antar daerah dalam menarik perhatian pemerintah pusat dan daerah. Dengan

memahami permasalahan dan isu strategis ini, Kecamatan Siantan Timur dapat merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kendala sekaligus memanfaatkan peluang yang ada guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung keberhasilan pembangunan di wilayahnya, Kecamatan Siantan Timur perlu memahami secara mendalam berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Identifikasi permasalahan menjadi langkah penting untuk mengungkap kendala-kendala yang muncul baik dari aspek internal maupun eksternal. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. Dengan pendekatan yang berbasis data dan analisis yang komprehensif, Kecamatan Siantan Timur dapat menyusun langkah strategis yang efektif untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan. Berikut disampaikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan Timur, sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam Pelayanan Administrasi Publik

- Kurangnya Aksesibilitas Layanan di Wilayah Terpencil

Wilayah geografis yang sulit dijangkau menyebabkan masyarakat di desa-desa terpencil mengalami keterbatasan akses terhadap layanan administrasi seperti penerbitan dokumen kependudukan dan perizinan.

- Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sistem pelayanan berbasis digital belum sepenuhnya diterapkan, sehingga proses pelayanan masih bergantung pada metode manual yang memakan waktu dan kurang efisien.

- Ketidacukupan Fasilitas Pelayanan

Beberapa fasilitas pendukung seperti kantor pelayanan, perangkat komputer, dan jaringan internet belum memadai untuk mendukung operasional yang optimal.

2. Permasalahan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa

Sebagian aparatur desa belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup dalam mengelola pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan administrasi.

- Koordinasi yang Belum Optimal

Sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa belum berjalan maksimal, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan kolaborasi intensif.

3. Permasalahan dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat:

- Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Belum Merata

Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di wilayahnya.

- Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah

Banyak program pemberdayaan yang bergantung pada anggaran dari pemerintah daerah atau pusat, sehingga

keberlanjutan program sering kali terganggu jika dukungan anggaran terbatas.

4. Permasalahan dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Tantangan Penegakan Peraturan di Wilayah Terpencil

Jarak antarwilayah yang jauh menyulitkan pengawasan dan penegakan peraturan secara konsisten.

- Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat

Masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga ketertiban umum dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:

**Tabel. 2.2.1 (Tabel. T-B.35.)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah yang Dihadapi	Akar Masalah
1	Pelayanan Administrasi Publik	- Kurangnya aksesibilitas layanan di wilayah perbatasan.	- Kondisi geografis yang masih belum terjangkau secara merata.
		- Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.	- Sistem pelayanan belum sepenuhnya berbasis digital.
		- Ketidacukupan fasilitas pendukung pelayanan.	- Keterbatasan anggaran untuk pengadaan fasilitas.
2	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan.	- Minimnya pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa.

		- Koordinasi yang belum optimal antara kecamatan dan pemerintah desa.	- Kurangnya mekanisme komunikasi yang terstruktur dan efektif.
3	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang belum merata.	- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran aktif dalam pembangunan.
		- Ketergantungan pada bantuan pemerintah dalam program pemberdayaan.	- Kurangnya diversifikasi sumber pendanaan atau kemandirian masyarakat dalam menjalankan program.
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Tantangan penegakan peraturan di wilayah terpencil.	- Jarak antarwilayah yang jauh menyulitkan pengawasan rutin.
		- Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.	- Minimnya edukasi tentang hukum dan peraturan kepada masyarakat.

Pemetaan ini menjadi langkah awal dalam menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung stabilitas sosial-politik di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.2.2 Isu Strategis

Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Siantan Timur memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelayanan publik yang berkualitas, pembinaan pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat menjadi fokus perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Siantan Timur.

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Isu-isu strategis ini diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta tantangan dan peluang yang ada. Berikut adalah isu-isu strategis Kecamatan Siantan Timur:

1. **Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik**
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, melalui pengembangan infrastruktur pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi.
2. **Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemerintahan Desa**
Meningkatkan kompetensi aparatur desa serta memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
3. **Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**
Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di wilayah kecamatan.
4. **Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan**
Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah. .
5. **Peningkatan Ketertiban dan Kesadaran Hukum Masyarakat**
Memperkuat penegakan hukum dan ketertiban umum melalui edukasi masyarakat serta pengawasan yang lebih efektif, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.
6. **Mitigasi Risiko Perubahan Iklim**

Mengantisipasi dampak perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut dan abrasi, dengan menyusun kebijakan adaptasi dan mitigasi yang melibatkan masyarakat lokal.

7. Kabupaten Layak Anak

Harus mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan duni usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

8. Kabupaten/Kota Sehat

Menciptakan Kondisi Daerah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

9. Stunting

Mencegah terjadinya stunting yaitu masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

10. Grand Desain Pembangunan Kependudukan

Diperlukannya Gran Desain pembangunan kependudukan sebagai dokumen perencanaan kependudukan formalitas serta merupakan arah bagi kecamatan Siantan Timur dalam pengelolaan dan pengembangan kebijakan pembangunan kependudukan yang dapat mendukung pembangunan strategis Kabupaten Kepulauan Anambas.

11. Inovasi Daerah,

Untuk mewujudkan Inovasi Daerah di kecamatan Siantan Timur diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai baik itu dukungan pendanaan maupun peralatan yang menunjang terwujudnya penerapan inovasi. Sehingga dengan terbentuknya inovasi bisa menciptakan pelayanan yang baik untuk terwujudnya salah satu Visi dan misi Kepala Daerah.

Isu-isu strategis ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Siantan Timur. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis isu strategis, diharapkan program-program yang dirancang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Siantan Timur menetapkan tujuan jangka menengah yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadapi tantangan yang ada. Tujuan-tujuan ini disusun berdasarkan analisis kondisi eksisting, potensi wilayah, dan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas. Melalui pendekatan yang terukur dan strategis, tujuan dan sasaran ini menjadi panduan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja di tingkat kecamatan.

Melalui tabel berikut, disajikan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai setiap tahun selama periode 2025-2030. Rincian ini menjadi komitmen Kecamatan Siantan Timur dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, tata kelola pemerintahan yang efektif, dan pembangunan yang inklusif. Implementasi tujuan dan sasaran ini diharapkan dapat mendorong keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah Kecamatan Siantan Timur.



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**Tabel. 3.1. (Tabel T-C.25.)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Siantan Timur**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel		Predikat AKIP	B	B	B	B	B	B	
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas	Nilai SAKIP	63,66	65,34	67,07	68,72	70,46	71,86	
		Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	76,69	76,82	77,45	77,75	77,9	77,9	

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Kecamatan Siantan Timur ini dituangkan dalam Dokumen Renstra yaitu berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar.

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Kecamatan Siantan Timur yang sesuai dengan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan visi dan misi serta tujuan RPJMD RPJMD 2025-2030 yaitu Visi : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera, Sedangkan Misi yang sesuai dengan tupoksi Kecamatan Siantan Timur yaitu : Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Tujuan Strategis

- Mewujudkan Pemerintahan Yang Transparan dan Akuntabel

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Penetapan sasaran yang terukur dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja yang relevan, mencakup berbagai aspek seperti kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran.

dipantau secara sistematis, sekaligus menjadi dasar untuk mengevaluasi pencapaian yang telah diraih. Sasaran Renstra Kecamatan Siantan Timur adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel, dengan Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - (a) Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Yang Berkualitas
 - (b) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Siantan Timur menetapkan tujuan dan sasaran, yang menjadi landasan pelaksanaan program kerja selama periode 2025-2030. Tujuan dan sasaran dirancang untuk mencapai hasil yang konkret dan terukur.

Strategi difokuskan pada upaya menyelesaikan permasalahan mendasar, memanfaatkan potensi, dan menangkap peluang pembangunan.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

Arah kebijakan menjadi panduan dalam pelaksanaan program serta alokasi sumber daya. Pendekatan ini bertujuan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian hasil pembangunan yang sesuai dengan prioritas wilayah. Sementara itu, arah kebijakan ditetapkan untuk memberikan panduan teknis yang lebih spesifik dalam pelaksanaan strategi. Dengan sinergi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, Kecamatan Siantan Timur berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya secara optimal. Berikut adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah disusun untuk jangka waktu 2025 hingga 2029:

Tabel. 3.4 (Table T-C.26)

Visi :	Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera			
Misi :	3. Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi			
	5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas pelayanan public	Tersedianya layanan yang cepat, efisien, dan terjangkau	- Mengembangkan infrastruktur pelayanan publik.	- Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan di wilayah perbatasan.
			- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan.	- Digitalisasi sistem pelayanan administrasi.

2 a b e l	Memperkuat tata kelola pemerintahan T	Peningkatan kapasitas aparatur desa	- Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa.	- Peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM aparatur desa.
		Optimalisasi koordinasi kecamatan dan desa	- Membentuk mekanisme komunikasi dan rapat koordinasi berkala.	- Penyusunan jadwal rutin dan pedoman pelaksanaan koordinasi.
3 I n i e n	Mendorong partisipasi masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	- Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi.	- Penyusunan program edukasi pembangunan berbasis masyarakat.
		Penguatan program pemberdayaan masyarakat	- Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat berbasis ekonomi lokal.	- Penambahan dukungan teknis dan finansial untuk program pemberdayaan.

ggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya mencapai tujuan jangka menengah. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program yang dijalankan akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Dalam rangka mencapai tujuan strategis dan sasaran pembangunan Kecamatan Siantan Timur periode 2025-2030, telah disusun rencana program dan kegiatan yang mendukung optimalisasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada, dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Selain itu, setiap program didukung oleh alokasi pendanaan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal.

Pendanaan untuk pelaksanaan program-program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan dukungan tambahan dari potensi sumber pendanaan lainnya. Pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan juga akan menjadi salah satu strategi dalam mengimplementasikan program.

Berikut adalah daftar program- program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Mendukung administrasi umum pemerintahan, seperti pengelolaan aset dan keuangan kecamatan.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan dan peningkatan kapasitas aparatur.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelatihan dan pendampingan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Menguatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketentraman wilayah.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan melalui pembenahan tata kelola administrasi.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Menguatkan tata kelola desa melalui pelatihan aparatur dan supervisi rutin.

4.2 Uraian Kegiatan

Berikut adalah Uraian Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang, Adapun uraian Kegiatan sebagai Berikut ;

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

9. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
11. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
12. Koordinasi Pembangunan Desa di Wilayahnya

4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Dibawah ini adalah Uraian SubKegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Anggaran yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang, Adapun uraiannya sebagaimana dalam Tabel Tabel 4.3(Tabel T-C.27.) Sebagai Berikut :

4.4 Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Uraian subkegiatan Kecamatan Siantan Timur pada Rencana Strategis Tahun 2025-2030 dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat menyurat

Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

g. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

h. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

i. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

j. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

k. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Sub kegiatan : Koordinasi Pembangunan Desa di Wilayahnya

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2030		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah daerah 2.Indek Kepuasan Masyarakat	100%	100%	2.585.523.333,00	100%	2.611.378.566,00	100%	2.634.968.059,00	100%	2.663.867.276,00	100%	2.690.505.948,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tahunan Perangkat Daerah yang di selesaikan	100%	100%	4.000.000,00	100%	4.200.000,00	100%	4.200.000,00	100%	4.200.000,00	100%	4.200.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	4 Dokumen	2.100.000,00	4 Dokumen	2.100.000,00	4 Dokumen	2.100.000,00	4 Dokumen	2.100.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	2.000.000,00	6 Dokumen	2.100.000,00	6 Dokumen	2.100.000,00	6 Dokumen	2.100.000,00	6 Dokumen	2.100.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.419.593.333,00	100%	2.443.049.266,00	100%	2.466.638.759,00	100%	2.490.464.147,00	100%	2.514.527.788,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	2.335.593.333,00	30 Orang/Bulan	2.358.949.266,00	30 Orang/Bulan	2.382.538.759,00	30 Orang/Bulan	2.406.364.147,00	30 Orang/Bulan	2.430.427.788,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	82.000.000,00	12 Dokumen	82.000.000,00	12 Dokumen	82.000.000,00	12 Dokumen	82.000.000,00	12 Dokumen	82.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	12 Laporan	2.100.000,00	12 Laporan	2.100.000,00	12 Laporan	2.100.000,00	12 Laporan	2.100.000,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	18.600.000,00	100%	18.600.000,00	100%	18.600.000,00	100%	18.600.000,00	100%	18.600.000,00	
Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	18.600.000,00	12 Laporan	18.600.000,00	12 Laporan	18.600.000,00	12 Laporan	18.600.000,00	12 Laporan	18.600.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	121.000.000,00	100%	122.799.300,00	100%	122.799.300,00	100%	127.873.129,00	100%	130.448.160,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	3.000.000,00	12 Paket	3.100.000,00	12 Paket	3.100.000,00	12 Paket	3.100.000,00	12 Paket	3.200.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	12 Paket	41.199.300,00	12 Paket	41.199.300,00	12 Paket	45.199.300,00	12 Paket	47.199.300,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	4 Laporan	10.100.000,00	4 Laporan	10.100.000,00	4 Laporan	11.100.000,00	4 Laporan	11.200.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan	15.000.000,00	6 Laporan	15.100.000,00	6 Laporan	15.100.000,00	6 Laporan	16.100.000,00	6 Laporan	16.200.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	5.100.000,00	4 Laporan	5.100.000,00	4 Laporan	5.173.829,00	4 Laporan	5.173.829,00	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	4 Laporan	10.100.000,00	4 Laporan	10.100.000,00	4 Laporan	10.100.000,00	4 Laporan	10.100.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	38.000.000,00	6 Laporan	38.100.000,00	6 Laporan	38.100.000,00	6 Laporan	38.100.000,00	6 Laporan	38.475.031,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	17.330.000,00	100%	17.630.000,00	100%	17.630.000,00	100%	17.630.000,00	100%	17.630.000,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	10.330.000,00	4 Laporan	10.430.000,00	4 Laporan	10.430.000,00	4 Laporan	10.430.000,00	4 Laporan	10.430.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	4 Laporan	2.100.000,00	4 Laporan	2.100.000,00	4 Laporan	2.100.000,00	4 Laporan	2.100.000,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4 Laporan	5.100.000,00	4 Laporan	5.100.000,00	4 Laporan	5.100.000,00	4 Laporan	5.100.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	0,00	4 Laporan	0,00	4 Laporan	0,00	4 Laporan	0,00	4 Laporan	0,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	5.000.000,00	100%	5.100.000,00	100%	5.100.000,00	100%	5.100.000,00	100%	5.100.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	5.000.000,00	4 Unit	5.100.000,00	4 Unit	5.100.000,00	4 Unit	5.100.000,00	4 Unit	5.100.000,00	
	Indeks Kepuasan layanan Masyarakat												
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	50.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	55.760.973,00	100%	65.212.223,00	100%	72.924.018,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	50.000.000,00	100%	55.000.000,00	100%	55.760.973,00	100%	65.212.223,00	100%	72.924.018,00	
Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Pemerintahan di Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	4 Laporan	55.000.000,00	4 Laporan	55.760.973,00	4 Laporan	65.212.223,00	4 Laporan	72.924.018,00	
	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri												
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitas Penataan Desa	100%	100%	185.000.000,00	100%	187.495.234,00	100%	188.495.234,00	100%	198.495.234,00	100%	201.495.234,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	185.000.000,00	100%	187.495.234,00	100%	188.495.234,00	100%	198.495.234,00	100%	201.495.234,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	185.000.000,00	4 Laporan	187.495.234,00	4 Laporan	188.495.234,00	4 Laporan	198.495.234,00	4 Laporan	201.495.234,00	

Kemampuan Satuan Timor

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	52.000.000,00	100%	58.000.000,00	100%	68.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	85.000.000,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	52.000.000,00	100%	58.000.000,00	100%	68.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	85.000.000,00	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	52.000.000,00	4 Laporan	58.000.000,00	4 Laporan	68.000.000,00	4 Laporan	75.000.000,00	4 Laporan	85.000.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	80.000.000,00	100%	87.000.000,00	100%	98.000.000,00	100%	97.000.000,00	100%	101.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Kesatuan Bangsa	100%	100%	80.000.000,00	100%	87.000.000,00	100%	98.000.000,00	100%	97.000.000,00	100%	101.000.000,00	
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Kesatuan Bangsa	250 Orang	250 Orang	80.000.000,00	250 Orang	87.000.000,00	250 Orang	98.000.000,00	250 Orang	97.000.000,00	250 Orang	101.000.000,00	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kecamatan Siantan Timur)	100%	100%	115.000.000,00	100%	130.000.000,00	100%	145.000.000,00	100%	152.000.000,00	100%	162.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90%	90%	115.000.000,00	90%	130.000.000,00	90%	145.000.000,00	90%	152.000.000,00	90%	162.000.000,00	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	4 Dokumen	45.000.000,00	4 Dokumen	55.000.000,00	4 Dokumen	60.000.000,00	4 Dokumen	64.000.000,00	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	4 Laporan	85.000.000,00	4 Laporan	90.000.000,00	4 Laporan	92.000.000,00	4 Laporan	98.000.000,00	
JUMLAH				3.067.523.333,00		3.128.873.800,00		3.190.224.266,00		3.251.574.733,00		3.312.925.200,00	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Siantan Timur yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2025- 2029 berperan sebagai instrumen kunci dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan Sasaran Renstra. IKU tersebut dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana program dan kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai target yang ditetapkan. Dengan adanya IKU, Kecamatan Siantan Timur dapat melakukan evaluasi kinerja secara objektif, sehingga memungkinkan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, IKU juga berfungsi sebagai alat untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai visi yang diharapkan. Dengan membandingkan capaian kinerja dengan alokasi anggaran yang telah dikeluarkan, Kecamatan Siantan Timur dapat menentukan apakah sumber daya yang digunakan telah dimanfaatkan secara optimal. Hal

ini penting untuk memastikan bahwa setiap pendanaan yang dialokasikan memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Kecamatan Siantan Timur, sekaligus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap indikator kinerja utama disertai dengan target yang dirancang secara realistis dan progresif sepanjang periode perencanaan 2025–2030. Penetapan target dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dan tren historis lima tahun sebelumnya. Penyusunan target juga memperhatikan dinamika nasional dan regional yang dapat mempengaruhi capaian pembangunan daerah. Oleh karena itu, IKU menjadi komponen krusial dalam menjaga konsistensi antara visi- misi kepala daerah dan rencana aksi pembangunan tahunan.

Sebagai pelengkap dari fungsi strategisnya, indikator kinerja utama (IKU) yang termuat dalam dokumen Renstra juga menjadi rujukan utama bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) masing-masing. IKU tersebut berfungsi sebagai benang merah yang menghubungkan sasaran pembangunan daerah dengan sasaran kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga memastikan keselarasan arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan lintas sektor. Dengan menjadikan IKU sebagai acuan dalam Renstra OPD, maka upaya pencapaian tujuan pembangunan dapat dilakukan secara terintegrasi, terukur, dan bertanggung jawab melalui program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masing-masing OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi dan konsistensi antar dokumen perencanaan, serta menjamin efektivitas pencapaian hasil pembangunan daerah secara menyeluruh. Untuk memastikan kesamaan pemahaman di antara seluruh pemangku kepentingan, setiap IKU yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Siantan Timur Tahun 2025-2030 dijabarkan lebih lanjut menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKK ini dirinci dalam Tabel 4.6, yang berfungsi sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dengan adanya IKK, seluruh pihak terkait dapat memiliki acuan yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga koordinasi dan sinergi antarinstansi dapat terjalin dengan lebih baik sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

dibawah ini Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Siantan Timur Sebagai Berikut :

**Tabel. 4.4 (Tabel T-C.28) Indikator
Kinerja Utama
Kecamatan Siantan Timur tahun 2025-2030**

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2030	2030	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	74,57%	74,90 %	75,17%	75,48%	75,77%	100%	
2	Nilai SAKIP	Persen	63,66%	65,34 %	67,05%	68,72%	70,46%	71,86%	
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Persen	73,48 %	73,87 %	74,13%	74,46%	74,72%	75,00%	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2030 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

Kecamatan Siantan Timur terus berupaya meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, berbagai program dan kegiatan telah dijalankan untuk mendukung fungsi utama kecamatan, seperti koordinasi pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, dan penyediaan layanan administrasi. Melalui optimalisasi sumber daya dan penerapan teknologi informasi, penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Siantan Timur menunjukkan perbaikan yang signifikan, baik dalam hal efisiensi waktu maupun peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat, telah menghasilkan capaian positif dalam menjaga ketertiban umum serta memperkuat sinergi pembangunan. Pendekatan partisipatif juga diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan wilayah. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Kecamatan Siantan Timur untuk terus meningkatkan kinerja di seluruh bidang urusan, guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang inklusif.

Berikut adalah tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:

Tabel. 4.6 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah yang
mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	BAIK	73,48	73,87	74,13	74,46	74,72	75	BAIK
2	Meningkatkan Perlindungan dan jaminan sosial	BAIK	62	64	66	68	70	72	BAIK
3	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran	BAIK	2,19	2,16	2,13	2,09	2,06	2,02	BAIK

Tabel ini mencerminkan komitmen Kecamatan Siantan Timur dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian Visi Pembangunan Daerah.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Siantan Timur periode 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dokumen ini mencerminkan komitmen Kecamatan Siantan Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Dengan mengintegrasikan berbagai potensi yang dimiliki serta mengantisipasi tantangan yang ada, Renstra ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh bagi tercapainya tujuan pembangunan sesuai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Melalui kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan terus dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Renstra ini. Dengan semangat kerja sama dan komitmen yang tinggi, Kecamatan Siantan Timur optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah kecamatan.

Tarempa, Januari 2025

CAMAT SIANTAN TIMUR,



SUHADI KUSUMOWIJOYO, S.Pd
Penata Tk I III.d
NIP. 19780117 200312 1 007